



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR — iii

DAFTAR ISI — v

DAFTAR TABEL — ix

DAFTAR GAMBAR — xi

## BAB I PERMASALAHAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH — 1

- A. Implikasi Otonomi Daerah — 1
- B. Permasalahan Umum Penyelenggaraan  
Pemerintah Daerah — 2
- C. Tingginya KKN dalam Pelaksanaan APBD — 3
- D. Penyelewengan dana APBD — 5
- E. Belum Maksimalnya Kinerja — 6
- F. Daya Serap Anggaran yang Rendah — 6
- G. Temuan Pemeriksaan BPK dalam Pengelolaan  
Keuangan Daerah — 7

**BAB II GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH — 11**

- A. Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah — 11
- B. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah — 14
- C. Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah — 15
- D. Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah — 17
- E. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah — 19
- F. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah — 20
- G. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah — 21
- H. Pelaksanaan Keuangan Daerah — 30
- I. Penatausahaan Keuangan Daerah — 31
- J. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. — 34
- K. Pengawasan Keuangan Daerah — 36

**BAB III PENTINGNYA GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH — 39**

- A. Pentingnya *Good governance* dalam Pemerintahan — 39
- B. Mengapa *Good Governance* Perlu Diterapkan di Indonesia — 47
- C. Tujuan dan Manfaat *Good Governance* — 52

**BAB IV KONSEP GOOD GOVERNANCE — 55**

- A. Pengertian *Government* dan *Governance* — 55
- B. Pengertian *Good Governance* — 58
- C. Pilar yang Membangun *Good Governance* — 62
- D. Fungsi Utama *Good Governance* — 65
- E. Tujuan *Good Governance* — 65

**BAB V PILAR DAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH — 71**

- A. Pilar dan Prinsip *Good Governance* dalam Sektor Publik — 71
- B. Pilar dan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah — 83

**BAB VI REGULASI DAN KEBIJAKAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH — 97**

- A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara — 98
- B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara — 102
- C. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara — 104
- D. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan — 104
- E. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik — 105

**BAB VII PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA — 109**

- A. Penerapan *Good Governance* di Pemerintahan — 109
- B. Penerapan *Good Governance* pada Pengelolaan Keuangan Daerah — 112
- C. Faktor yang Memengaruhi dalam Mewujudkan *Good Governance* — 114

**BAB VIII REFORMASI BIROKRASI — 117**

- A. Latar Belakang Perlunya Reformasi Birokrasi — 117
- B. Birokrasi sebagai Pelaksana Kebijakan dan Pelayanan Masyarakat — 119
- C. Reformasi Birokrasi dalam Konsep *Good Governance* — 121
- D. Program Reformasi Birokrasi — 126
- E. Area Perubahan Reformasi Birokrasi 2015-2019 — 130
- F. Peran Kepemimpinan Kepala Daerah — 133
- G. Peningkatan Sumber Daya Manusia — 134
- H. Reformasi Birokrasi Keuangan — 135

